### BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

hukum Dalam internasional khususnya membahas tentang kelautan, keberadaan sebuah pulau dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan zona maritime. Kemudian hal tersebut pada akhirnya menyebabkan terjadinya sengketa wilayah, seperti yang terjadi pada sengketa Pulau Kuril Selatan antara Rusia dan Jepang. Sengketa Pulau Kuril Selatan pada saat ini masih jauh dari kata damai meskipun kedua pimpinan pemerintah dari kedua negara telah melewati periode yang berbeda. Seperti yang selayaknya dilakukan oleh pemimpin suatu negara, mereka telah melakukan berbagai pertemuan untuk membahas masalah sengketa Pulau Kuril Selatan yang telah berlangsung selama kurang lebih selama 65 tahun.

Ditambah lagi, dalam kasus persengketaan Pulau Kuril Selatan, tidak didasarkan oleh hukum internasional seperti yang telah ditetapkan mengenai batas-batas negara seperti yang telah tertulis didalam Hukum UNCLOS. Pulau Kuril Selatan yang saat ini berada di tangan Rusia merupakan hasil akhir dari kesepakatan yang terjadi sebelum dan setelah Perang Dunia II. Namun ketidaksetujuan yang dilakukan oleh pihak Jepang menjadikan keambiguan dalam status kepemilikan pulau tersebut.

Pulau Kuril Selatan sebenarnya merupakan beberapa pulau atas Kepulauan Kuril yang didalamnya terdapat lebih dari 56 rangkaian pulau. Kepulauan ini memisahkan Laut Okhotsk disebelah barat laut dan di sebelah barat daya Samudra Pasifik. Kepulauan Kuril sendiri memiliki dua nama yang berbeda dari segi Rusia dan Jepang. Dalam bahasa Rusia pulau ini dinamakan Pulau Kurile, sedangkan dalam bahasa

Jepang mereka biasa menyebutnya dengan Pulau Chishima atau *Kuriru rettō* yang memiliki arti sebagai Pulau Seribu.<sup>1</sup>

Hingga saat ini status kepemilikan pulau yang masih depertanyakan adalah pulau yang berada di bagian wilayah Utara, atau yang di ketahui oleh Rusia yaitu Pulau Kuril dibagian selatan. Pulau-pulau yang bersengketa pada saat ini berada di bawah administrasi Rusia sebagai Distrik Kuril Selatan, Sakhalinskaya Oblast. Disatu sisi Pulau Kuril Selatan juga diklaim oleh Jepang sebagai teritorial negaranya, yang disebut sebagai Teritorial Utara atau Chishima Selatan di bawah administrasi Subprefektur Nemuro, Prefektur Hokkaido.<sup>2</sup>

Dalam Pulau Kuril Selatan terdapat beberapa pulau yang hingga saat ini masih di permasalahkan yaitu, Iturup, Kunashir, Shikotan, dan Habomai.<sup>3</sup> Pulau-pulau yang disebutkan dalam Pulau Kuril Selatan memiliki luas wilayah kurang lebih sebesar 4.996 km persegi. Pulau-pulau besar yang terdapat pada Pulau Kuril Selatan adalah pulau Iturup dengan luas 3.138 km persegi dan pulau Kunashiri dengan luas 1.500 km persegi. Sedangkan dua pulau kecil yang terdapat pada Pulau Kuril Selatan antara lain adalah pulau Shikotan seluas 255 km persegi dan kelompok pulau Habomai yang terdiri dari pulau Akiyuri, Harukaru, Shibotsu, Suisho, dan pulau Yuri. Kelompok pulau yang merupakan anak dari Pulau Habomai ini memiliki luas sebesar 102 km persegi. 4 peta dari pulau-pulau yang Berikut merupakan persengketakan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Educalingo, Kuril Islands. Dikutip dari https://educalingo.com/en/dic-en/kuril-islands diakses pada 11 Oktober 2017, pukul 00.48

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rossiyskaya Gazeta, "Tempatkan Sistem Antimisil, Rusia Perpanas Sengketa Wilayah dengan Jepang", Dikutip dari https://id.rbth.com/politics/2016/12/06/tempatkan-sistem-antimisil-rusia-perpanas-sengketa-wilayah-dengan-jepang\_654063, diakses pada tanggal 17 Oktober 2017, pukul 20.46

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ajay Kamalakaran, Kepulauan Kuril Selatan: Mengapa Rusia Tak Mau Mengembalikan Iturup dan Kunashir Kepada Jepang?, Dikutip dari https://id.rbth.com/politics/2015/06/30/kepulauan\_kuril\_selatan\_mengapa\_rusia\_tak\_mau\_mengembalikan\_iturup\_d\_28453 pada tanggal 11 November 2017, pukul 23.01

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> S.M. Noor Sengketa Laut Cina & Kepulauan Kuril, Pustaka Pena Press, Makasar. 2015. Hal 53-54



Sumber: jejaktapak.com, "18 Pulau yang Paling Diperebutkan di Dunia." 12 Juli 2015

Awal mula munculnya masalah persengketaan antar kedua negara yaitu pada saat terjadinya aksi saling klaim atas kepemilikan Kepulauan Kuril pada masa pemerintahan kekaisaran Rusia dan Jepang. Aksi saling klaim tersebut mempertanyakan siapa yang paling pertama dalam menemukan kepulauan tersebut. Dua kekaisaran kuat pada saat itu, Jepang maupun Rusia menyatakan bahwa merekalah yang pertama kali menemukan pulau-pulau tersebut. Hingga akhirnya hasil dari pertikaian tersebut terjadi sebuah penetapan atas status pulau-pulau tersebut. Perjanjian Shimoda pada tahun 1855 kemudian menjadikan perjanjian ini sebagai perjanjian pertama yang dilakukan oleh Rusia dan Jepang. <sup>5</sup>

Dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa Pulau Iturup merupakan milik Jepang dan Kepulauan Kuril yang terletak di sebelah Utara merupakan milik Rusia, yang pada saat itu masih sering disebut dengan Uni Soviet. Namun

3

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hokkaido Government, History of Northern Territories, diakse dari http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/hrt/hp-en/hist-en.htm pada tanggal 11 Desember 2017 pukul 00.01

perjanjian Shimoda merupakan sebuah perjanjian perdagangan yang terjalin diantara keduabelah pihak. Sehingga dalam perjanjian ini tidak mengakui kedaulatan negara atas pulaupulau tersebut. Perjanjian Shimoda kemudian ditinjau lebih lanjut dalam Perjanjian Saint Petersburg pada tahun 1875 untuk lebih memperjelas batas wilayah, yang sebelumnya tidak ditegaskan pada perjanjian yang telah disepakati.

Lama setelah Perjanjian Shimoda ditetapkan, Rusia – Jepang mengalami peperangan pada tahun 1904 – 1905. Peperangan tersebut terjadi dikarenakan adanya perebutan wilayah antara Rusia dan Jepang. Kekalahan Rusia dalam melawan Jepang, memaksa Rusia untuk menandatangani Perjanjian Porsmouth pada tahun 1905 yang merupakan tindak lanjut dari hasil peperangan antar Rusia dan Jepang. Dalam Perjanjian Porsmouth, Jepang memegang suara penuh atas kekalahan Rusia, sehingga isi dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa kepulauan Shakalin Selatan menjadi milik Jepang, sedangkan Kepulauan Kuril menjadi milik Rusia.

Kekalahan yang telah mutlak milik rusia Rusia pada saat perang Rusia-Jepang tidak menjadikan Rusia sebagai negara yang lemah. Pada tahun 1945, pasca Perang Dunia II, Rusia kembali merebut pulau Shakalin dari tangan Jepang serta mengusir penduduk Ainu Jepang yang bermukim di Kepulauan Kuril. Kejadian terebut tentu membuat Jepang kembali memanas dan menyerukan permintaannya untuk kembalinya pulau-pulau yang berada di tangan Rusia.

Kemudian pada saat Perang Dunia II Rusia juga terlibat dalam peperangan melawan Jepang, yang kemudian diakhiri dengan kekalahan Jepang. Kejadian yang telah disampaikan tersebut pada akhirnya melahirkan Perjanjian San Fransisco (1951), yang mana perjanjian tersebut juga secara resmi mengakhiri Perang Dunia II. Dalam perjanjian tersebut

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> S.M. Noor, Sengketa Laut Cina & Kepulauan Kuril, Pustaka Pena Press, Makasar. 2015. Hal 57-58

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Jejak Rusia Di Hindia Belanda, Dikutip dari http://www.hariansejarah.id/2016/11/jejak-rusia-di-hindia-belanda.html pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 20.29

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Treaty of Portsmouth 1905

tertulis bahwa Jepang harus menghentikan klaim atas Kepulauan Kuril terhadap Rusia. 9 Namun Perjanjian San Fransisco juga tidak menjelaskan kepemilikan Kepulauan Kuril serta dianggap tidak mengakui kedaulatan Rusia atas pulau-pulau tersebut. Serta tidak adanya kesetujuan Rusia atas persetujuan tersebut, yang ditandai dengan tidak adanya tanda tangan Rusia dalam perjanjian pengakhir Perang Dunia II. perjanjian tersebut masih Sehingga dalam memiliki kesimpangsiuran terhadap kepemilikan Kepulauan Kuril. Rusia pada akhirnya memilih untuk tetap mempertahankan pulau-pulau tersebut dengan alasannya sendiri. Namun klaim tersebut tentu saja di tolak secara mentah oleh Jepang, karena alasan disisi lain Jepang juga memiliki dalam mempertahankan wilayahnya.

Usaha antar dua negara dalam upaya penyelesaian sengketa Pulau Kuril Selatan melalui jalan yang cukup panjang. Isu sengketa pulau yang terjadi hingga saat ini, beberapa kali telah berusaha diselesaikan dengan diadakannya berbagai perjanjian. Dalam kurun waktu kurang lebih 65 tahun, persengketaan ini sebelumnya telah memiliki beberapa perjanjian tertulis. Bermula dari Perjanjian Shimoda (1855) perjanjian pertama, yang menjelaskan pembagian perbatasan wilayah pulau pada masa Keshogunan Tokugawa, Perjanjian Saint Petersburg (1875) yang diadakan karena dianggap kurang jelasnya kesepakatan yang tertulis didalam Perjanjian Shimoda (1855). Kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian Portsmouth (1905), Perjanjian Kairo (1943), Perjanjian Yalta (1945), Perjanjian San Fransisco (1951) hingga yang terakhir pada Deklarasi Bersma Jepang-Rusia (1956). Dimana hasil dari seluruh pertemuan yang telah diselenggarakan, pada akhirnya tetap tidak membawa hasil yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Treaty Of Peace With Japan, Signed At San Fransico, On 8 September

<sup>1951 &</sup>lt;sup>10</sup> S.M. Noor, Sengketa Laut Cina & Kepulauan Kuril, Pustaka Pena Press, Makasar 2015

Fakta yang terjadi dari adanya perjanjian-perjanjian yang telah berlangsung, tidak ada satupun perjanjian damai permanen yang telah disepakati oleh keduabelah pihak negara. Sejarah panjang perjanjian kedua negara tersebut hingga saat ini belum mencapai kata damai, hal itu dikarenakan oleh ketidak terimaan Jepang atas klaim dan hasil perjanjian yang memposisikan Rusia sebagai pemilik hak atas Pulau Kuril Selatan. Namun pada kenyataannya perjanjian yang beberapa kali sudah dilangsungkan tidak juga membuahkan hasil. Jepang tetap mengajukan suara ketidak setujuannya terhadap keputusan bahwa Pulau Kuril Selatan adalah milik Rusia.

Rusia sendiri dalam menanggapi protes Jepang tentang kembalinya Pulau Kuril Selatan kepada Jepang, kemudian memancing respon publik. Rusia terlihat bersikap acuh dan tetap terlihat mempertahankan Pulau Kuril Selatan demi mempertahankan kesejahteraan negaranya. Padahal dalam Deklarasi Bersama antara Rusia-Jepang (1956) terdapat perjanjian yang memberi pernyataan bahwa Rusia akan menyerahkan beberapa pulau atas Kepulauan Kuril yang berada di bagian selatan Rusia terhadap Jepang setelah adanya perjanjian damai diantara kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Dalam beberapa tahun belakangan ini Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya juga telah bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe untuk menyelesaikan masalah persengketaan wilayah yang telah berlarut-larut selama lebih dari 60 tahun. 12 Namun, hasil dari pertemuan dari kedua pemimpin negara tidak ditindak lanjuti, sehingga status Pulau Kuril Selatan hingga saat ini masih sama dengan tahuntahun sebelumnya. Pertemuan tersebut diadakan karena persengketaan yang terjadi antara Rusia dan Jepang tentunya

\_

<sup>11</sup> Kuril Island Dispute, Dikutip dari

https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Kuril\_Islands\_dispute.html pada tanggal 17 Desember 2017 pukul 11.00

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Djanti Virantika, Manfaatkan KTT APEC, Rusia-Jepang Bahas Sengketa Kepulauan Kuril.

https://news.okezone.com/read/2017/11/12/18/1812651/manfaatkan-ktt-apec-rusia-jepang-bahas-sengketa-kepulauan-kuril#lastread diakses pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 18.56

akan mempengaruhi hubungan bilateral serta hubungan diplomatik kedua negara. Sehingga para presiden dari masing masing negara mengusahakan untuk menghentikan perebutan wilayah yang telah berlangsung lebih dari setengah abad.

yang tidak jauh, kepala Dalam jangka waktu pemerintahan Rusia yang kini sedang menjabat, Vladmir Putin angkat bicara kepada media terkait persengketaan yang masih berlangsung dengan Jepang. Kepala negara yang akrab dipanggil Putin itu menyatakan bahwa persengketaan Pulau Kuril Selatan dengan Jepang dapat di kompromikan dan dapat diselesaikan dengan cara damai tanpa harus ada kata siapa yang kalah dan siapa yang menang. Namun semua yang telah masih dilontarkan tetap sebatas wacana, permasalahan ini tetap perlu dilanjutkan demi mendapatkan hasil yang mufakat.

Sikap bersikeras yang dilakukan oleh Rusia maupun Jepang diakibatkan oleh kepentingan masing-masing negara untuk memiliki pulau-pulau tersebut. Tidak dipungkiri bahwa aspek politik, ekonomi, dan militer merupakan kepentingan utama sebuah negara dalam berdiplomasi. Kuatnya sikap mempertahankan kepentingan oleh kedua negara menyebaban sulitnya bagi kedua negara dalam mencapai kesepakatan status kepemilikan Pulau Kuril Selatan. Salah satu hal yang dapat mereka lakukan hanyalah mempertahankan posisi agar tidak terjadi konflik dengan melakukan berbagai diplomasi preventif

#### B. Rumusan Masalah

Bagaimana diplomasi preventif yang dilakukan oleh Rusia-Jepang dalam penyelesaian sengketa Pulau Kuril Selatan Pasca Perang Dunia II?

## C. Kerangka Pemikiran

# 1. Konsep Kepentingan Nasional (National Interest)

Setiap negara pada dasarnya memiliki berbagai tujuan yang ingin dicapai demi terlaksananya cita-cita atau kebutuhan bangsa mereka. Dalam melakukan hubungan antar negara,

disetiap celahnya setiap negara pasti memiliki alasan-alasan tertentu yang pada nantinya dapat menguntungkan pihak negara. Hal tersebut bisa diartikan sebagai suatu kepentingan nasional, yang mana setiap alasan yang di ajukan oleh setiap negara pasti didasari oleh pencapaian tujuan yang sebelumnya telah direncanakan oleh negara tersebut. Dalam hal ini, kepentingan nasional bisa menjadi sebuah kata kunci dari keamanan serta kesejahteraan suatu negara. Keamanan serta kesejahteraan dipastikan merupakan landasan utama dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional.

Dalam Konsep National Interest menurut Jack C. Plano dan Roy Olton dapat dikutip suatu pendapat sebagai berikut:

"National interest is the fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalize conception of those element of constitute the state most vital needs. That's include self preservation, independence, territorial integrity, military security, and economic well-being". 13

Dalam kutipan tersebut dapat di artikan bahwa kepentingan nasional merupakan penentu tujuan sebuah negara, yang kemudian memandu para pengambil keputusan dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional suatu negara biasanya mengutamakan kebutuhan yang paling penting bagi negaranya, semisal dibidang ekonomi dan politik. Hal tersebut termasuk dalam pelestarian diri, kemandirian, integritas teritorial, keamanan militer, dan ekonomi kesejahteraan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diartikan bahwa kepentingan nasional adalah tujuan serta faktor mendasar yang dimiliki oleh setiap negara dalam menentukan dan memandu

8

 $<sup>^{\</sup>rm 13}$  Jack C. Plano dan Roy Olton, The International Relation Dictionary, ABC Clio. 1982. Hal 128

para pembuat keputusan dalam merumuskan politik kebijakan luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional merupakan pemahaman konsep yang sangat umum, namun dapat menjadi unsur yang sangat vital bagi keadaan sebuah negara. Unsur tersebut mencakup berbagai macam aspek seperti kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemandirian, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.

# 2. Konsep Diplomasi Preventif (Preventive Diplomacy)

Diplomasi merupakan hal yang lumrah terjadi dalam hubungan antarnegara. Diplomasi dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan dunia internasional tentang berbagai aspek, seperti contohnya dalam memperjuangkan keinginan dari masing-masing pihak yang juga bisa disebut sebagai kepentingan nasional suatu negara. Didalam konsep diplomasi ketahui terdapat berbagai cara dalam mengimplementasikan konsep diplomasi itu sendiri. Diplomasi mengandung beberapa unsur penting, membutuhkan instrumen tertentu untuk memperlancar tujuan dari diplomasi itu sendiri. Maka dari itu, diplomasi memiliki beberapa pola dalam pelaksanaanya yang berkembang sesuai dengan kepentingan nasional, kemampuan nasional serta kondisi internasional yang terjadi.

Diplomasi secara harfiah berasal dari kata "Diploum" "melipat". Diplomasi merupakan berarti mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam hubungan negara lain.14 Diplomasi merupakan dengan pelaksanaan hubungan antara negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, pembentukan kebijaksanaan luar negeri, serta pelaksanaannya. 15 Diplomasi dan politik luar negeri keduanya tentu tidak dapat dipisahkan, tetapi kedua-duanya merupakan

<sup>14</sup> S.L Roy, Diplomasi, Rajawali Press, 1991, Hal 1

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Jack Plano dan Roy Olton.1999. The International Relation Dictionary. ABC Clio. 1982. Hal.20

kebijakan eksekutif untuk menetapkan strategi, diplomasi dan taktik. 16 Dengan demikian dapat diartikan bahwa diplomasi juga merupakan cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuannya dan memperoleh dukungan mengenai dasar-dasar berfikir yang diambilnya.

Terdapat beberapa jenis diplomasi yang biasanya dijalankan oleh negara-negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yakni Preventive Diplomacy, Offensive Diplomacy, Secret Diplomacy, Public Diplomacy, Culture Diplomacy, Dollar Diplomacy dan Gun Diplomacy. Namun dalam membahas kasus persengketaan yang terjadi di Pulau Kuril Selatan antara Rusia dan Jepang, penulis akan menggunakan jenis Diplomasi Preventif.

Diplomasi Preventif dapat diartikan sebagai jenis berinteraksi menggunakan *Soft Diplomacy*, yang mana dalam pengimplementasiannya diperlukan tekat dalam menjunjung tinggi perdamaian tanpa harus melibatkan perang didalamnya. Pada era modern seperti sekarang ini banyak negara yang sangat menghindari adanya gerakan-gerakan yang melibatkan *hard diplomacy* seperti gencatan senjata dan sebagainya. Dalam menjunjung tinggi nilai perdamaian, kasus-kasus yang terdapat di dalam kancah internasional, diupayakan dengan sebaik mungkin untuk dapat diselesaikan dengan cara damai tanpa adanya kekerasan.

Dalam Konsep Diplomasi Preventif menurut Roy S.L. dapat dikutip suatu pendapat sebagai berikut:

Diplomasi preventif umumnya hadir setelah perang dingin atau pada awal abad ke 20 untuk mencegah keterlibatan negara-negara *superpower* dalam menghadapi konflik lokal ataupun regional negara dunia ketiga. Diplomasi ini banyak dilakukan oleh negara-negara yang merdeka dan diakui kedaulatannya setelah perang dingin, dan dilakukan untuk mencegah berbagai konflik yang berpotensi perang senjata.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Sumaryo Suryokusumo. 2004. Praktik Diplomasi. Jakarta: STIH''IBLAM''. Hal.53-54.

Diplomasi preventif secara umum digunakan untuk mencegah keterlibatan negara-negara besar dalam sebuah konflik, karena negara-negara yang sedang memiliki konflik tentunya ingin menyelesaikan masalahnya secara mandiri. 17

Dalam agenda sekretaris jenderal PBB yang berjudul "An Agenda for Peace" tertuliskan sebuah kutipan yang mengatakan bahwa untuk menjaga perdamaian diperlukan adanya diplomasi preventif. Diplomasi preventif menurut PBB dapat dijelaskan sebagai sebuah aksi untuk mencegah perbedaan pendapat yang terjadi antar kelompok bahwa secara perlahan telah berkembang menjadi sebuah konflik terbuka dan membatasi efek dari pertikaian tersebut agar tidak semakin meluas.

Para aktor diplomasi preventif menjunjung tinggi aksi anti-kekerasan, mereka juga berusaha mengupayakan berbagai cara untuk dapat mencegah konflik sehingga hal tersebut tidak berubah menjadi konflik bersenjata vang membahayakan kedamaian dan keamanan internasional. Diplomasi preventif juga tercantum dalam Charter PBB ayat 33 dan didefinisikan sebagai bagian dari metode resolusi konflik yang diaplikasikan sebelum poin awal perselisihan terjadi untuk meredam konflik. Dari definisi yang telah disebutkan diatas, dapat ditarik bahwa diplomasi preventif merupakan pola diplomasi yang ditujukan untuk mencegah dan meredam konflik. 18

Diplomasi preventif dapat dilakukan melalui beberapa jalur yaitu jalur politik, militer, dan ekonomi. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi-organisasi internasional. Menurut Mochamad Bedjaoui upaya dalam melakukan diplomasi prefentiv bertujuan untuk mencegah

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> S.L Roy, Diplomasi, Rajawali Press, 1991, hal 161

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Amaliya Mastur, "Macam-Macam Diplomasi", Dikutip dari http://amaliamastur-fisip13.web.unair.ac.id/artikel\_detail-116604-Negosiasi%20Diplomasi-MacamMacam%20Diplomasi.html pada tanggal 15 Desember 2017, pukul 22.26

konflik yang mungkin akan terjadi. Diantaranya konflik antar pemerintah dan kelompok minoritas dalam suatu negara, perselisihan secara terbuka, serta penyebaran konflik sekecil-kecilnya apabila terjadi konflik.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, seperti layaknya diplomasi pada umumnya, secara harfiah diplomasi memiliki fungsi untuk mencegah adanya perang serta menjalin hubungan baik antar negara. Sehingga diplomasi preventif dapat digunakan sebagai opsi untuk menyelesaikan konflik-konflik internasional secara damai, mencegah terjadinya sengketa, penyebaran konflik dan mencegah terjadinya gencatan senjata antar negara-negara yang ada di segala penjuru dunia. Oleh karena itu diplomasi prefentiv memiliki prinsip kuat yang telah dicantumkan oleh PBB, seperti yang telah tertera diatas.

## D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

"Diplomasi preventif yang dilakukan oleh Rusia-Jepang dalam penyelesaian sengketa Pulau Kuril Selatan pasca Perang Dunia II melalui berbagai macam pertemuan serta beberapa kerjasama yang terjalin dibidang ekonomi."

# E. Tujuan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini bertuiuan untuk memberikan tambahan informasi terkini tentang Persengketaan Pulau Kuril Selatan secara lebih jelas dan mendetil. Penelitian ini juga menganalisa alasan negara dalam mempertahankan pulau tersebut serta membahas metode apa yang digunakan oleh kedua belah pihak dalam menyelesaikan kasus persengketaan yang tak kunjung sampai pada titik damai.

NEGOSIASI% 20DAN% 20DIPLOMASI-DIPLOMASI% 20PREVENTIF.html pada tanggal 17 Februari 2018 pukul 01.13

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Nurul Aini Hijriyah, Diplomasi Prefentiv. Dikutip dari http://nurul-a-h-fisip10.web.unair.ac.id/artikel\_detail-49501-

## F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan dalam penelitian ini di ambil pada pasca Perang Dunia II, lebih tepatnya setelah Deklarasi Bersama antara Rusia-Jepang di tetapkan pada tahun 1956 hingga tahun 2017. Akan tetapi, dalam pembahasan ini penulis tetap membahas peristiwa sejarah yang terjadi sebelum Perang Dunia II, dimana akar dan inti dari permasalahan persengketaan Pulau Kuril Slatan ini bermula. Seiring berjalannya waktu, persengketaan yang tak kunjung berakhir hingga saat ini, memiliki dinamika-dinamika yang tentunya akan mempengaruhi pembahasan persengketaan Pulau Kuril Selatan pasca Perang Dunia II.

#### G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara yang dipergunakan dalam penelitian yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan pemaparan secara deskriptif. Pemaparan secara deskriptif ditujukan untuk mempelajari masalah-masalah yang ada, dengan cara mengumpulkan informasi yang aktual secara rinci, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan dari masalah satu dengan yang lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu menggunkan teknik penelitian keperpustakaan (*library research*), yaitu melalui pengumpulan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil tulisan orang lain yang telah dipublikasikan, seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, dan media cetak. Data sekunder yang menjadi sumber dalam penulisan ini diperoleh baik dari perpustakaan umum, intansi pemerintah, media cetak/elektronik, koleksi pribadi, dan situs internet. Sumber yang telah didapat kemudian di akumulasikan dan dikomparasi sehingga akan memperoleh generalisasi terhadap data tersebut.

#### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan di lakukan dalam penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bagian dengan sistem per Bab, agar penelitian ini dapat tersusun secara teratur dan sistematis.

BAB I Menguraikan tentang bagian yang menjadi dasar dalam penulisan skripsi ini, yaitu didalamnya berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Menjelaskan secara lebih lanjut mengenai awal mula terjadinya sengketa Pulau Kuril Selatan antara Rusia dan Jepang, yakni sejarah awal kepemilikan atas Pulau Kuril Selatan, dinamika-dinamika yang terjadi antara Rusia-Jepang dalam kasus persengketaan Pulau Kuril Selatan, landasan dasar klaim yang digunakan oleh Rusia maupun Jepang dalam mempertahankan Pulau Kuril Selatan, serta kondisi Pulau Kuril Selatan yang hingga saat ini masih di perdebatkan status kepemilikannya.

BAB III Menjabarkan tentang kepentingan yang dimiliki oleh Rusia dan Jepang dalam mempertahankan Pulau Kuril Selatan, khususnya kepentingan-kepentingan dari segi politik, ekonomi, dan militer.

BAB IV Menjabarkan tentang upaya diplomasi preventif yang dilakukan oleh Rusia-Jepang dalam menyelesaikan sengketa pulau kuril selatan pasca Perang Dunia II, yakni pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Rusia-Jepang pada tahun 1956-2017 serta kerjasama yang terjalin diantara kedua negara.

BAB V Menguraikan kesimpulan secara menyeluruh atas pembahasan yang telah dijelaskan serta saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh sang penulis tentang sengketa Pulau Kuril Selatan.